



Rudy C Tarumingkeng : *Ekonomi Indonesia Kontemporer: Dinamika Makro, Investasi, dan Kesejahteraan Masyarakat*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

ruduct75@gmail.com

6 Maret 2026

EKONOMI INDONESIA KONTEMPORER: DINAMIKA MAKRO, INVESTASI, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Pendahuluan

Ekonomi Indonesia kontemporer memperlihatkan watak yang menarik sekaligus kompleks. Di satu sisi, Indonesia masih mampu menjaga pertumbuhan pada kisaran yang relatif solid ketika banyak ekonomi menghadapi perlambatan, gejolak geopolitik, dan ketidakpastian pasar keuangan global. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11 persen, lebih tinggi daripada 5,03 persen pada 2024. PDB nominal mencapai Rp23.821,1 triliun, sementara PDB per kapita mencapai Rp83,7 juta atau sekitar USD5.083,4. Pada triwulan IV-2025, pertumbuhan tahunan mencapai 5,39 persen, dengan ekspor dan pembentukan modal tetap bruto tetap memberi sumbangan penting terhadap momentum ekonomi. Secara spasial, Pulau Jawa masih mendominasi struktur ekonomi nasional dengan kontribusi 56,93 persen terhadap PDB nasional. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Di sisi lain, ketahanan pertumbuhan itu tidak boleh dibaca secara terlalu sederhana sebagai bukti bahwa seluruh persoalan ekonomi telah terselesaikan. Pertumbuhan ekonomi, betapapun pentingnya, selalu perlu diuji oleh tiga pertanyaan mendasar. Pertama, apakah pertumbuhan tersebut cukup berkualitas untuk menghasilkan pekerjaan

yang lebih baik? Kedua, apakah pertumbuhan itu mampu menurunkan kemiskinan dan ketimpangan secara berkelanjutan? Ketiga, apakah arus investasi dan penguatan makro benar-benar sampai pada kesejahteraan rumah tangga, terutama kelompok rentan, pekerja informal, dan masyarakat berpendapatan menengah-bawah? Data terbaru menunjukkan kemajuan pada sebagian indikator sosial, tetapi juga mengingatkan bahwa kesejahteraan tidak identik dengan pertumbuhan. ([BPS Web API](#))

Karena itu, membahas ekonomi Indonesia kontemporer tidak cukup dengan melihat angka pertumbuhan semata. Kita perlu membaca keterhubungan antara dinamika makroekonomi, arus investasi, dan distribusi manfaat ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dalam esai ini, ekonomi Indonesia akan dilihat sebagai sebuah sistem: sektor riil, sektor keuangan, perdagangan luar negeri, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, investasi domestik dan asing, serta indikator kesejahteraan sosial saling memengaruhi. Hanya dengan kerangka seperti itu kita dapat memahami mengapa Indonesia tampak tangguh secara makro, tetapi tetap menghadapi pekerjaan besar dalam menjadikan pertumbuhan sebagai pengalaman kesejahteraan yang nyata. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

2. Ketahanan makro di tengah ketidakpastian global

Dalam lanskap ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil, capaian pertumbuhan 5,11 persen pada 2025 layak dibaca sebagai sinyal resiliensi. IMF, dalam penutupan Article IV Consultation pada Januari 2026, juga menilai ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah lingkungan eksternal yang menantang dan memperkirakan pertumbuhan tetap terjaga sekitar 5,1 persen pada 2026. Penilaian ini penting karena menunjukkan bahwa kinerja Indonesia tidak hanya dibaca positif oleh otoritas domestik, tetapi juga oleh lembaga internasional yang menilai kestabilan makro, inflasi, posisi eksternal, dan arah kebijakan. ([IMF](#))

Ketahanan ini terutama bertumpu pada kekuatan permintaan domestik dan daya lenting kebijakan. Kementerian Keuangan pada Februari 2026 menyatakan bahwa pertumbuhan 2025 melampaui ekspektasi dan ditopang penguatan domestik. Pemerintah juga menekankan bahwa program seperti bantuan sosial, BLTS, program magang, dan berbagai insentif lain dipakai untuk menjaga daya beli dan menopang aktivitas ekonomi. Sementara dari sisi BPS, pada triwulan IV-2025 komponen konsumsi pemerintah tumbuh sangat tinggi secara kuartalan, dan pada level tahunan 2025 ekspor barang dan jasa justru menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 7,03 persen. Ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak semata bertumpu pada konsumsi rumah tangga, tetapi juga memperoleh tenaga dari kebijakan fiskal dan kinerja eksternal. ([Ministry of Finance Indonesia](#))

Namun, resiliensi bukan berarti kebal. Justru karena Indonesia masih terintegrasi kuat dengan ekonomi global, tekanan eksternal tetap signifikan. Ketidakpastian pasar keuangan global, fluktuasi harga komoditas, dan perubahan arah aliran modal tetap memengaruhi rupiah, pasar obligasi, dan biaya pembiayaan. Bank Indonesia dalam siaran pers Februari 2026 menegaskan bahwa fokus kebijakan moneter tetap diarahkan pada stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global, sambil tetap mendorong pertumbuhan. Artinya, ekonomi Indonesia memasuki 2026 bukan dari posisi rapuh, tetapi juga bukan dari posisi bebas risiko. ([Bank Indonesia](#))

3. Inflasi, suku bunga, dan pembacaan yang lebih cermat

Salah satu aspek penting dalam membaca ekonomi kontemporer adalah inflasi. Pada Desember 2025, inflasi tahunan Indonesia tercatat 2,92 persen. Pada Januari 2026, inflasi tahunan naik menjadi 3,55 persen, dan pada Februari 2026 naik lagi menjadi 4,76 persen. Sekilas, angka Februari 2026 dapat menimbulkan kesan bahwa tekanan harga memburuk tajam. Tetapi BPS menegaskan bahwa tingginya inflasi tahunan Februari 2026

terutama dipengaruhi efek basis rendah, karena pada Januari–Februari 2025 pemerintah memberi diskon tarif listrik 50 persen. Jadi, sebagian lonjakan inflasi tahunan pada awal 2026 adalah persoalan pembandingan statistik, bukan semata ledakan harga yang sepenuhnya baru. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pembacaan seperti ini penting secara akademik. Dalam ekonomi makro, indikator yang sama dapat mengandung makna berbeda tergantung konteks pembentuknya. Inflasi yang naik karena gangguan pasokan pangan, depresiasi kurs, dan kenaikan administered prices memiliki implikasi kebijakan yang tidak sama dengan inflasi yang naik karena efek basis. BPS secara eksplisit menyebut normalisasi tarif listrik dan inflasi emas sebagai penyebab utama inflasi Februari 2026. Karena itu, kualitas analisis ekonomi Indonesia kontemporer ditentukan bukan hanya oleh kemampuan mengutip angka, tetapi juga oleh kemampuan menafsirkan struktur di balik angka. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dalam konteks kebijakan, Bank Indonesia memutuskan mempertahankan BI-Rate di 4,75 persen pada Januari dan Februari 2026. BI menilai keputusan itu konsisten dengan kebutuhan menjaga stabilitas rupiah sekaligus mendukung pertumbuhan. BI juga menegaskan bahwa suku bunga kebijakan ini berada pada level terendah sejak 2022 dan telah turun total 150 basis poin sejak September 2024, dengan 125 basis poin penurunan sepanjang 2025. Ini berarti ruang moneter telah digunakan untuk memberi dorongan pada ekonomi, tetapi BI tetap berhati-hati karena kestabilan nilai tukar dan inflasi tetap menjadi sasaran utama. ([Bank Indonesia](#))

Bagi masyarakat, pertanyaan akhirnya sederhana: apakah inflasi dan suku bunga itu terasa dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya: ya. Inflasi memengaruhi harga pangan, listrik, transportasi, dan biaya hidup umum, sementara suku bunga memengaruhi kredit usaha, kredit perumahan, dan pembiayaan konsumsi. Di sinilah keseimbangan kebijakan menjadi

penting. Suku bunga yang terlalu tinggi dapat menekan investasi dan konsumsi, tetapi suku bunga yang terlalu rendah di tengah gejolak eksternal dapat mengganggu stabilitas kurs. Pilihan BI mempertahankan suku bunga menandakan bahwa ekonomi Indonesia sedang dikelola dalam logika keseimbangan, bukan ekspansi tanpa batas. ([Bank Indonesia](#))

4. Sektor eksternal: kuat, tetapi tetap perlu dijaga

Posisi eksternal Indonesia pada akhir 2025 hingga awal 2026 memberi sinyal yang cukup menenangkan. Bank Indonesia melaporkan bahwa Neraca Pembayaran Indonesia triwulan IV-2025 mencatat surplus USD6,1 miliar. Untuk keseluruhan 2025, defisit transaksi berjalan hanya USD1,5 miliar atau 0,1 persen dari PDB, jauh lebih rendah dibanding defisit 2024 yang sebesar USD8,6 miliar atau 0,6 persen dari PDB. Cadangan devisa pada akhir Desember 2025 mencapai USD156,5 miliar, dan pada akhir Februari 2026 tetap tinggi di USD151,9 miliar meskipun menurun dari Januari. Cadangan tersebut tetap berada pada level yang oleh BI dinilai memadai untuk menopang stabilitas eksternal. ([Bank Indonesia](#))

Pada sisi perdagangan, awal 2026 juga menunjukkan bahwa ekspor masih menjadi bantalan penting. BPS mencatat nilai ekspor Januari 2026 sebesar USD22,16 miliar, naik 3,39 persen dibanding Januari 2025, sementara impor mencapai USD21,20 miliar, naik 18,21 persen secara tahunan. Dengan demikian, neraca perdagangan masih mencatat surplus sekitar USD0,96 miliar pada Januari 2026. Kenaikan impor yang lebih tinggi dari ekspor perlu dibaca hati-hati: di satu sisi, ia bisa mencerminkan kebutuhan bahan baku dan barang modal yang meningkat; di sisi lain, bila tren itu berlanjut tanpa penguatan ekspor bernilai tambah, tekanan terhadap neraca transaksi berjalan dapat meningkat kembali. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dari sudut pandang strategis, kekuatan sektor eksternal Indonesia masih banyak ditopang oleh surplus perdagangan barang, terutama nonmigas,

sementara defisit migas, jasa, dan pendapatan primer tetap menjadi tantangan. BI secara terbuka menyatakan bahwa defisit migas membesar sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi domestik, dan defisit pendapatan primer naik karena pembayaran dividen. Ini adalah pengingat bahwa ketahanan eksternal Indonesia masih mempunyai sisi struktural yang perlu dibenahi: ketergantungan energi, basis ekspor yang perlu terus ditingkatkan nilainya, dan kebutuhan untuk memperdalam industri domestik agar impor tertentu dapat ditekan. ([Bank Indonesia](#))

5. Struktur pertumbuhan: masih bertumpu pada Jawa dan permintaan domestik

Walaupun pertumbuhan Indonesia cukup baik, strukturnya menunjukkan bahwa transformasi ekonomi belum sepenuhnya merata. BPS mencatat bahwa kelompok provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi ekonomi nasional dengan kontribusi 56,93 persen terhadap PDB dan pertumbuhan 5,30 persen pada 2025. Fakta ini menunjukkan dua hal. Pertama, Jawa tetap menjadi pusat utama aktivitas produksi, konsumsi, jasa, dan investasi. Kedua, agenda pembangunan wilayah di luar Jawa masih menghadapi tantangan besar, meskipun berbagai kebijakan hilirisasi, infrastruktur, dan investasi telah diarahkan untuk mendorong pemerataan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Di sinilah diskursus ekonomi kontemporer Indonesia tidak bisa berhenti pada angka nasional. Pertumbuhan 5,11 persen dapat menyembunyikan ketimpangan spasial, karena daerah dengan basis industri, logistik, dan pasar besar memperoleh manfaat yang berbeda dibanding wilayah yang bergantung pada sektor primer, komoditas, atau transfer fiskal. Jika ekonomi nasional bertumbuh tetapi kesempatan ekonomi tetap terkonsentrasi, maka pemerataan kesejahteraan akan melambat. Dalam bahasa pembangunan, pertumbuhan nasional belum tentu identik dengan pertumbuhan yang tersebar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Hal yang sama berlaku dari sisi sumber pertumbuhan. Indonesia masih sangat mengandalkan kekuatan domestik—konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah—untuk menopang ekonomi. Ini adalah kekuatan, karena pasar domestik Indonesia besar. Tetapi ia juga dapat menjadi kerentanan bila kualitas pendapatan rumah tangga melemah, produktivitas stagnan, atau belanja pemerintah tidak cukup efisien. Karena itu, pertumbuhan yang bertahan di kisaran 5 persen perlu disertai agenda yang lebih dalam: peningkatan produktivitas, industrialisasi yang lebih luas, dan diversifikasi ekspor yang lebih bernilai tambah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

6. Investasi sebagai mesin pertumbuhan

Dalam ekonomi Indonesia kontemporer, investasi menempati posisi yang sangat strategis. Ia tidak hanya menjadi sumber pembentukan kapasitas produksi, tetapi juga menjadi simbol kepercayaan pelaku usaha terhadap arah kebijakan, stabilitas, dan prospek pasar Indonesia. Data resmi BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi semester I-2025 mencapai Rp942,9 triliun. Pada triwulan II 2025, PMDN menyumbang Rp275,5 triliun atau 57,7 persen dari total investasi, menandakan bahwa investor domestik tetap memainkan peran sangat kuat. Pada triwulan III 2025, realisasi investasi mencapai Rp491,4 triliun, naik 13,9 persen secara tahunan, dan wilayah luar Jawa menyerap Rp265,8 triliun atau 54,1 persen, lebih tinggi daripada Jawa yang sebesar Rp225,6 triliun. ([BKPM](#))

Pada level tahunan, investasi 2025 bahkan melampaui target pemerintah. BKPM menyebut target investasi 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun, dan berbagai laporan yang mengutip konferensi pers resmi Menteri Investasi menyebut realisasi 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3 persen dari target, tumbuh 12,7 persen dibanding tahun sebelumnya. BKPM juga menegaskan bahwa kontribusi investasi sektor hilirisasi mencapai 30,2 persen, dan nilai investasi hilirisasi Januari–Desember 2025 mencapai Rp584,1 triliun, tumbuh 43,3 persen secara tahunan.

Penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi 2025 mencapai 2,71 juta orang. (BKPM)

Angka-angka ini memberi pesan penting. Pertama, investasi di Indonesia tetap atraktif meskipun dunia diliputi ketidakpastian. Kedua, investasi domestik tetap penting dan tidak sepenuhnya tergantung pada PMA. Ketiga, hilirisasi telah menjadi poros baru pembentukan investasi. Keempat, mulai ada bukti bahwa sebaran investasi ke luar Jawa memperoleh kemajuan. Dalam narasi pembangunan, ini berarti ekonomi Indonesia tidak semata tumbuh karena konsumsi, tetapi juga karena akumulasi modal dan pembentukan basis produksi yang lebih luas. (BKPM)

7. Hilirisasi, industrialisasi, dan nilai tambah

Di antara berbagai tema ekonomi Indonesia mutakhir, hilirisasi menempati panggung utama. BKPM menegaskan bahwa sektor dengan kontribusi investasi terbesar tetap berasal dari industri logam dasar, barang logam bukan mesin, dan peralatannya. Pada triwulan II-2025 dan juga dalam capaian tahunan 2025, sektor ini tetap menjadi penopang dominan investasi. Ini berkaitan erat dengan strategi negara mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, terutama mineral, agar ekspor Indonesia bergerak dari bahan mentah ke produk bernilai tambah lebih tinggi. (BKPM)

Secara teoritis, hilirisasi menjanjikan tiga keuntungan. Pertama, peningkatan nilai tambah domestik. Kedua, perluasan rantai pasok industri. Ketiga, penciptaan lapangan kerja yang lebih beragam. Namun, keberhasilan hilirisasi tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi atau nilai ekspor semata. Hilirisasi yang sehat harus mendorong transfer teknologi, kenaikan produktivitas tenaga kerja, kemunculan industri turunan, dan penguatan basis manufaktur nasional. Bila hilirisasi hanya menghasilkan ekspor setengah jadi dengan ketergantungan tinggi pada

impor mesin, tenaga ahli, dan pasar tertentu, maka manfaat jangka panjangnya akan terbatas. (BKPM)

Karena itu, agenda investasi Indonesia tidak cukup bila hanya berfokus pada “berapa besar dana masuk”. Pertanyaan yang lebih penting adalah “masuk ke sektor apa, menciptakan ekosistem seperti apa, dan meninggalkan warisan produktif seperti apa”. Di sinilah industrialisasi Indonesia diuji. Investasi besar memang dapat menaikkan angka pertumbuhan, tetapi hanya investasi yang menumbuhkan kapasitas nasional yang benar-benar dapat mengubah struktur ekonomi. Hilirisasi yang terhubung dengan pendidikan vokasi, riset, logistik, energi, dan pasar ekspor akan jauh lebih berkelanjutan daripada hilirisasi yang hanya menghasilkan lonjakan statistik jangka pendek. (BKPM)

8. Investasi dan kualitas pekerjaan

Salah satu argumen terkuat untuk menarik investasi adalah penciptaan lapangan kerja. BKPM melaporkan realisasi investasi 2025 menyerap 2,71 juta tenaga kerja. Dari sudut makro, ini adalah angka yang sangat penting karena Indonesia membutuhkan penciptaan kerja dalam skala besar untuk menampung tambahan angkatan kerja dan mengurangi tekanan pengangguran terbuka. Di tingkat nasional, BPS mencatat jumlah angkatan kerja pada Agustus 2025 mencapai 154 juta orang, penduduk bekerja 146,54 juta orang, dan tingkat pengangguran terbuka 4,85 persen, turun tipis dari tahun sebelumnya. Rata-rata upah buruh mencapai Rp3,33 juta per bulan, naik 1,94 persen dari Agustus 2024. (BKPM)

Namun, seperti pertumbuhan, angka pekerjaan juga perlu dibaca secara kualitas. Sebuah ekonomi bisa menambah jumlah orang yang bekerja tanpa secara otomatis memperbaiki mutu pekerjaannya. BPS menunjukkan bahwa pada Agustus 2025 pekerjaan informal masih mencakup 52,54 persen dari total pekerja, sementara pekerjaan formal 47,46 persen. Artinya, lebih dari separuh penduduk bekerja masih berada

di sektor yang umumnya lebih rentan dari segi pendapatan, perlindungan sosial, kestabilan kerja, dan produktivitas. Dalam kerangka ini, keberhasilan investasi belum sepenuhnya berarti keberhasilan transformasi pasar tenaga kerja. (bovendigoelkab.bps.go.id)

Inilah salah satu paradoks penting ekonomi Indonesia. Secara agregat, lapangan kerja bertambah dan pengangguran turun. Tetapi bila sebagian besar tambahan pekerjaan berada pada segmen informal, berupah rendah, atau produktivitas terbatas, maka peningkatan kesejahteraan rumah tangga akan berjalan lebih lambat daripada pertumbuhan PDB. Karena itu, hubungan antara investasi dan kesejahteraan tidak bersifat otomatis. Investasi harus cukup berkualitas untuk melahirkan pekerjaan yang formal, produktif, dan naik kelas, bukan sekadar memperbesar jumlah orang yang "tercatat bekerja". (bovendigoelkab.bps.go.id)

9. Kemiskinan menurun, tetapi belum menjadi cerita yang selesai

Salah satu kabar baik dari ekonomi Indonesia kontemporer adalah penurunan kemiskinan. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan hasil Susenas September 2025 sebesar 8,25 persen, dengan jumlah penduduk miskin 23,36 juta orang. Ini menunjukkan perbaikan dibanding periode-periode sebelumnya dan menandakan bahwa pemulihan ekonomi, perlindungan sosial, dan perbaikan pasar kerja memberi dampak pada kelompok bawah. Dalam studi pembangunan, penurunan kemiskinan seperti ini penting karena menunjukkan bahwa pertumbuhan belum sepenuhnya "buta distribusi". ([BPS Web API](https://www.bps.go.id/web-api))

Tetapi kemiskinan di Indonesia tetap harus dipahami secara lebih struktural. Angka 23,36 juta orang bukan angka kecil. Di baliknya terdapat kerentanan rumah tangga yang mudah tertekan oleh inflasi pangan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, atau kehilangan pekerjaan. Banyak rumah tangga yang secara statistik tidak lagi miskin tetap berada sangat dekat dengan garis kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan dapat turun, tetapi kerentanan belum tentu ikut turun secepat itu.

Karena itu, ekonomi Indonesia tidak hanya memerlukan strategi pengurangan kemiskinan, tetapi juga strategi pencegahan “jatuh miskin kembali”. ([BPS Web API](#))

Narasi kesejahteraan juga perlu memperhatikan dimensi wilayah. BPS menunjukkan perbedaan besar antarprovinsi dan antara kawasan perkotaan-perdesaan dalam indikator sosial. Ini berarti keberhasilan nasional belum tentu identik dengan pengalaman seluruh daerah. Ekonomi Indonesia kontemporer masih ditandai oleh keberagaman kondisi regional: ada daerah yang tumbuh cepat karena investasi dan industri, tetapi ada pula yang masih sangat rentan terhadap fluktuasi komoditas, keterbatasan infrastruktur, atau lemahnya penciptaan kerja nonpertanian. Karena itu, kebijakan kesejahteraan harus tetap sensitif wilayah, bukan hanya sensitif sektor. ([BPS Web API](#))

10. Ketimpangan: membaik, tetapi belum hilang

Selain kemiskinan, ketimpangan adalah ukuran penting kesejahteraan. BPS melaporkan gini ratio Indonesia pada September 2025 sebesar 0,363, turun dari 0,375 pada Maret 2025 dan dari 0,381 pada September 2024. Gini ratio perkotaan turun menjadi 0,383 dan perdesaan menjadi 0,295. BPS juga mencatat bahwa porsi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah mencapai 19,28 persen secara nasional, 18,32 persen di perkotaan, dan 22,09 persen di perdesaan. Angka-angka ini menunjukkan adanya perbaikan distribusi pengeluaran, meskipun tingkat ketimpangan masih cukup nyata, terutama di perkotaan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Secara analitis, penurunan gini ratio adalah kabar baik, tetapi ia tidak berarti masalah ketimpangan selesai. Pertama, gini ratio berbasis pengeluaran sering kali bergerak lebih lambat dibanding ketimpangan kekayaan, aset, akses pendidikan bermutu, dan kesempatan ekonomi. Kedua, gini ratio nasional dapat tampak membaik, tetapi ketimpangan spasial dan sektoral tetap besar. Ketiga, dalam ekonomi yang sedang

bertumbuh, perbaikan distribusi pengeluaran perlu diterjemahkan ke dalam mobilitas sosial yang lebih kuat: kesempatan naik kelas bagi rumah tangga bawah dan menengah-bawah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bagi Indonesia, ketimpangan juga berkaitan erat dengan struktur ekonomi. Dominasi Jawa, perbedaan kualitas infrastruktur, konsentrasi industri di wilayah tertentu, serta kesenjangan kualitas pendidikan dan kesehatan ikut membentuk distribusi hasil pertumbuhan. Karena itu, agenda mengurangi ketimpangan tidak cukup melalui bantuan sosial saja. Ia menuntut kombinasi kebijakan: pendidikan, kesehatan, konektivitas, urbanisasi yang lebih terkelola, dukungan UMKM, pembiayaan inklusif, dan penciptaan kerja produktif di luar pusat-pusat ekonomi lama. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

11. Peran APBN dan kebijakan publik dalam menjaga kesejahteraan

Ekonomi Indonesia kontemporer tidak dapat dipahami tanpa peran negara. Dalam konteks 2025–2026, APBN tetap diposisikan pemerintah sebagai shock absorber, penjaga daya beli, dan penopang pertumbuhan. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa APBN 2026 akan terus menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pertumbuhan berkelanjutan, dan melindungi daya beli masyarakat. Pemerintah juga menyebut berbagai program seperti bantuan sosial, BLTS, magang, dukungan terhadap ketahanan pangan, dan stimulus tertentu sebagai bagian dari bauran kebijakan yang membantu menopang ekonomi domestik. ([Kementerian Keuangan](#))

Dari perspektif makro, kebijakan fiskal semacam ini masuk akal. Ketika ekonomi menghadapi tekanan global, negara perlu memastikan bahwa konsumsi rumah tangga tidak jatuh terlalu dalam, kelompok rentan tetap terlindungi, dan sektor-sektor strategis tetap bergerak. Namun dari perspektif pembangunan jangka panjang, kualitas fiskal juga penting. Belanja sosial yang efektif harus dipadukan dengan belanja produktif:

infrastruktur, pendidikan, kesehatan, riset, logistik, dan transformasi industri. Tanpa itu, fiskal hanya akan bersifat penyangga jangka pendek, bukan pengubah struktur ekonomi. ([Ministry of Finance Indonesia](#))

Di sinilah diskusi tentang kesejahteraan menjadi lebih dalam.

Kesejahteraan bukan semata hasil dari pendapatan pasar, tetapi juga dari desain kebijakan publik. Rumah tangga yang menghadapi harga pangan tinggi, akses transportasi terbatas, dan layanan kesehatan mahal akan merasakan tekanan kesejahteraan lebih besar, meskipun pertumbuhan nasional tetap tinggi. Sebaliknya, kebijakan publik yang tepat sasaran dapat membuat ekonomi yang "hanya" tumbuh 5 persen tetap terasa lebih manusiawi bagi masyarakat. ([Ministry of Finance Indonesia](#))

12. Rupiah, stabilitas keuangan, dan kepercayaan pasar

Salah satu indikator penting ekonomi kontemporer Indonesia adalah kemampuan menjaga stabilitas keuangan di tengah tekanan global. Bank Indonesia melaporkan bahwa pada akhir Februari 2026 rupiah dibuka di sekitar Rp16.750 per dolar AS, sementara pada awal Februari sempat dibuka di sekitar Rp16.850. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa rupiah tetap sensitif terhadap dinamika global, tetapi tidak bergerak dalam pola krisis. BI menekankan bahwa stabilisasi nilai tukar dilakukan secara konsisten dan cadangan devisa tetap berada pada level tinggi. (jateng.bps.go.id)

Bagi investor, stabilitas makro semacam ini sangat penting. Investasi jangka panjang lebih mudah masuk ke negara yang inflasinya terkendali, cadangan devisanya kuat, current account deficit-nya rendah, dan bank sentralnya kredibel. Dalam konteks itu, ekonomi Indonesia memperoleh keuntungan dari reputasi kebijakan yang relatif berhati-hati. IMF juga menekankan bahwa inflasi Indonesia tetap terjangkau dengan baik dan transaksi berjalan diperkirakan tetap terkendali. ([IMF](#))

Namun, stabilitas keuangan selalu mengandung biaya dan pilihan. Menjaga rupiah, misalnya, bisa menuntut intervensi pasar atau pengetatan likuiditas tertentu. Menurunkan suku bunga terlalu cepat bisa mendorong pertumbuhan, tetapi juga berisiko memicu tekanan keluar modal. Karena itu, kebijakan ekonomi Indonesia kontemporer pada dasarnya adalah seni mengelola trade-off: antara pertumbuhan dan stabilitas, antara dukungan domestik dan kewaspadaan eksternal, antara stimulus dan disiplin. ([Bank Indonesia](#))

13. Tantangan struktural yang belum selesai

Meskipun indikator agregat membaik, ekonomi Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Pertama adalah kualitas pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka memang menurun, tetapi pekerjaan informal masih dominan dan rata-rata upah buruh tumbuh tipis. Kedua adalah produktivitas. Pertumbuhan yang stabil di sekitar 5 persen adalah capaian baik, tetapi untuk melompat ke tingkat pendapatan lebih tinggi, Indonesia memerlukan pertumbuhan produktivitas yang lebih kuat, bukan hanya perluasan aktivitas ekonomi yang ada. Ketiga adalah pemerataan spasial, karena konsentrasi ekonomi di Jawa masih sangat besar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Keempat adalah ketergantungan pada beberapa motor pertumbuhan tertentu, terutama konsumsi domestik, komoditas, dan investasi yang terkonsentrasi di sektor-sektor unggulan tertentu. Kelima adalah kebutuhan memperdalam industri manufaktur dan rantai pasok. BKPM menunjukkan bahwa investasi hilirisasi tumbuh kuat, tetapi tantangan selanjutnya adalah memastikan hilirisasi itu terhubung dengan industrial upgrading, riset, dan kapasitas SDM. Keenam adalah daya tahan rumah tangga terhadap guncangan biaya hidup. Penurunan kemiskinan dan gini ratio adalah kemajuan, tetapi kerentanan ekonomi rumah tangga masih tinggi bila inflasi pangan, biaya energi, atau ketidakpastian pekerjaan meningkat. ([BKPM](#))

Dengan kata lain, Indonesia hari ini bukan ekonomi yang lemah, tetapi juga belum menjadi ekonomi yang sepenuhnya tertransformasi. Ia berada pada fase antara: cukup tangguh untuk bertahan, cukup besar untuk menarik investasi, cukup stabil untuk dipercaya, tetapi masih harus bekerja keras agar pertumbuhan benar-benar menjadi kemakmuran yang lebih luas. Itulah mengapa tema kesejahteraan harus selalu diletakkan berdampingan dengan tema makro dan investasi. ([IMF](#))

14. Prospek ke depan

Ke depan, prospek ekonomi Indonesia tetap cukup positif, tetapi bergantung pada kualitas kebijakan dan kemampuan mengelola risiko. IMF memperkirakan pertumbuhan sekitar 5,1 persen pada 2026. Pemerintah sendiri dalam dokumen kebijakan fiskal 2026 menargetkan pertumbuhan 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, dan nilai tukar sekitar Rp16.500 per dolar AS. Perbedaan kecil antara proyeksi internasional dan target pemerintah adalah hal wajar. Yang lebih penting adalah bahwa semua pihak tampaknya sepakat pada satu hal: Indonesia masih memiliki ruang untuk tumbuh, asalkan stabilitas tetap terjaga dan reformasi struktural berlanjut. ([IMF](#))

Prospek ini sangat bergantung pada beberapa syarat. Investasi harus terus masuk, tetapi lebih berkualitas. Kebijakan fiskal harus tetap melindungi kelompok rentan, tetapi juga efisien. Kebijakan moneter harus cukup fleksibel untuk mendukung pertumbuhan, tetapi tetap disiplin menjaga stabilitas. Ekspor harus bergerak naik nilainya, bukan hanya volumenya. Dan yang tak kalah penting, pasar kerja Indonesia harus menghasilkan lebih banyak pekerjaan formal dan produktif. Tanpa itu, pertumbuhan akan tetap tampak baik di grafik, tetapi terasa kurang kuat di dapur rumah tangga. ([Bank Indonesia](#))

15. Penutup

Ekonomi Indonesia kontemporer memperlihatkan gambaran yang pada dasarnya kuat namun belum lengkap. Secara makro, Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan 5,11 persen pada 2025, mengendalikan inflasi 2025 di kisaran moderat sebelum terdorong efek basis pada awal 2026, mempertahankan BI-Rate di level 4,75 persen, menjaga neraca pembayaran dan cadangan devisa, serta mempertahankan surplus perdagangan pada awal 2026. Semua ini menunjukkan adanya fondasi stabilitas yang cukup kokoh. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Di bidang investasi, Indonesia menunjukkan performa yang mengesankan. Realisasi investasi melampaui target 2025, hilirisasi tumbuh cepat, PMDN tetap kuat, dan luar Jawa mulai memperoleh porsi lebih besar. Ini mengonfirmasi bahwa Indonesia tetap menarik sebagai tujuan investasi dan sedang bergerak membangun struktur ekonomi yang lebih bernilai tambah. Namun, keberhasilan investasi baru akan benar-benar berarti bila ia memperbaiki kualitas pekerjaan, memperkuat produktivitas, dan memperluas pemerataan. ([BKPM](#))

Pada sisi kesejahteraan, kita melihat kemajuan yang patut dihargai: kemiskinan turun menjadi 8,25 persen, gini ratio membaik menjadi 0,363, dan pengangguran terbuka turun ke 4,85 persen. Tetapi kita juga melihat pekerjaan rumah yang besar: dominasi pekerjaan informal, pertumbuhan upah yang terbatas, kerentanan rumah tangga terhadap biaya hidup, dan ketimpangan peluang antarwilayah. Karena itu, makna terdalam ekonomi Indonesia hari ini bukan sekadar “bertumbuh”, melainkan “sedang berjuang mengubah pertumbuhan menjadi kesejahteraan yang lebih inklusif”. Di situlah tantangan terbesar ekonomi Indonesia kontemporer—bukan hanya menjaga angka tetap baik, tetapi memastikan bahwa angka-angka itu menjadi kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat luas. ([BPS Web API](#))

Berikut **Glosarium** dan **Daftar Pustaka** untuk tema “**Ekonomi Indonesia Kontemporer: Dinamika Makro, Investasi, dan Kesejahteraan Masyarakat.**” Istilah dipilih agar selaras dengan pembahasan pertumbuhan, inflasi, investasi, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan distribusi kesejahteraan dalam konteks Indonesia mutakhir. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Glosarium

Produk Domestik Bruto (PDB)

Nilai total barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian suatu negara dalam periode tertentu; PDB menjadi indikator utama untuk mengukur skala dan pertumbuhan ekonomi nasional. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pertumbuhan Ekonomi

Kenaikan output ekonomi dari waktu ke waktu, yang dalam konteks Indonesia 2025 tercermin pada pertumbuhan PDB riil sebesar 5,11 persen. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

PDB Per Kapita

Rata-rata pendapatan ekonomi per penduduk yang diperoleh dengan membagi PDB nominal dengan jumlah penduduk; indikator ini sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran rata-rata. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Inflasi

Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam

suatu periode; inflasi memengaruhi daya beli rumah tangga, biaya produksi, dan keputusan kebijakan moneter. ([Bank Indonesia](#))

Efek Basis (Base Effect)

Fenomena statistik ketika perbandingan tahunan tampak tinggi atau rendah karena titik pembandingan tahun sebelumnya tidak normal; ini relevan untuk membaca inflasi Indonesia awal 2026. ([Bank Indonesia](#))

BI-Rate

Suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang menjadi sinyal utama arah kebijakan moneter dan memengaruhi bunga kredit, likuiditas, serta stabilitas nilai tukar. Pada Februari 2026 BI-Rate dipertahankan di 4,75 persen. ([Bank Indonesia](#))

Cadangan Devisa

Aset valuta asing yang dikuasai otoritas moneter untuk menjaga stabilitas sektor eksternal, termasuk menopang nilai tukar dan pembayaran internasional; posisi Indonesia akhir Februari 2026 sebesar USD151,9 miliar. ([Bank Indonesia](#))

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)

Catatan sistematis seluruh transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dan dunia internasional; NPI mencerminkan kesehatan sektor eksternal negara. ([Bank Indonesia](#))

Transaksi Berjalan (Current Account)

Komponen dalam neraca pembayaran yang mencakup perdagangan barang dan jasa, pendapatan primer, dan transfer sekunder; defisit rendah menunjukkan tekanan eksternal yang relatif terkendali. ([Bank Indonesia](#))

Surplus Neraca Perdagangan

Kondisi ketika nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor; pada Januari 2026 Indonesia masih mencatat surplus perdagangan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Ekspor

Penjualan barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri; dalam struktur pertumbuhan Indonesia 2025, ekspor barang dan jasa merupakan salah satu komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tinggi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Impor

Pembelian barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri; kenaikan impor dapat mencerminkan bertambahnya kebutuhan bahan baku, barang modal, atau konsumsi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi, seperti bangunan, mesin, dan infrastruktur; investasi merupakan mesin penting pertumbuhan jangka menengah dan panjang. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)

Realisasi investasi yang berasal dari investor domestik; pada 2025 PMDN tetap menjadi salah satu penopang utama investasi Indonesia. ([BKPM](#))

PMA (Penanaman Modal Asing)

Investasi yang berasal dari investor luar negeri; PMA penting untuk menambah modal, teknologi, pasar, dan integrasi dalam rantai pasok global. ([BKPM](#))

Hilirisasi

Strategi pengolahan sumber daya alam di dalam negeri agar menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dibanding ekspor bahan mentah. Pada 2025, investasi hilirisasi tumbuh kuat dan menjadi salah satu penopang realisasi investasi nasional. ([BKPM](#))

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Persentase angkatan kerja yang tidak bekerja namun sedang mencari

pekerjaan atau mempersiapkan usaha; indikator ini menggambarkan tekanan di pasar kerja. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pekerjaan Informal

Pekerjaan yang umumnya tidak memiliki kepastian kontrak, perlindungan sosial yang memadai, atau struktur kelembagaan formal; dominasi pekerjaan informal menunjukkan tantangan kualitas pasar kerja. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Rata-rata Upah Buruh

Rata-rata pendapatan tenaga kerja buruh/karyawan/pegawai dalam periode tertentu; indikator ini penting untuk menilai apakah pertumbuhan ekonomi diikuti perbaikan pendapatan kerja. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kemiskinan

Kondisi ketika pengeluaran seseorang berada di bawah garis kemiskinan; pada September 2025 persentase penduduk miskin Indonesia turun menjadi 8,25 persen. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Garis Kemiskinan

Nilai minimum pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan; dipakai BPS untuk menentukan status miskin secara resmi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Ketimpangan

Perbedaan distribusi pendapatan atau pengeluaran antarkelompok masyarakat; di Indonesia umumnya diukur dengan gini ratio. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Gini Ratio

Indikator statistik untuk mengukur ketimpangan distribusi pengeluaran atau pendapatan, dengan nilai antara 0 dan 1; semakin tinggi nilainya, semakin timpang distribusinya. Pada September 2025 gini ratio Indonesia sebesar 0,363. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Daya Beli

Kemampuan rumah tangga membeli barang dan jasa dengan pendapatannya; daya beli dipengaruhi inflasi, upah, bantuan sosial, dan stabilitas ekonomi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

APBN sebagai Shock Absorber

Peran anggaran negara dalam menahan tekanan ekonomi melalui perlindungan sosial, dukungan konsumsi, dan stimulus fiskal agar guncangan tidak langsung menekan rumah tangga dan dunia usaha. ([Kementerian Keuangan](#))

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2025, 5 November). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen, rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 2 Maret). *Ekspor dan impor Indonesia Januari 2026 masing-masing tercatat USD22,16 miliar dan USD21,20 miliar.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, 26 Februari). *BI-Rate tetap 4,75%: mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.* ([Bank Indonesia](#))

Rudy C Tarumingkeng : *Ekonomi Indonesia Kontemporer: Dinamika Makro, Investasi, dan Kesejahteraan Masyarakat*

Bank Indonesia. (2026, 24 Februari). *Neraca Pembayaran Indonesia triwulan IV 2025 surplus dan tetap terjaga.* ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, Maret). *Cadangan devisa Februari 2026 tetap tinggi.* ([Bank Indonesia](#))

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2025, 17 Oktober). *Realisasi investasi triwulan III 2025 tembus Rp491,4 triliun: hilirisasi dan PMDN jadi penggerak utama.* ([BKPM](#))

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2026, 15 Januari). *Realisasi investasi 2025 lampau target, hilirisasi melompat 43,3 persen.* ([BKPM](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, Februari). *APBN Kita Februari 2026: kinerja fiskal kuat dan berdampak nyata.* ([Kementerian Keuangan](#))

International Monetary Fund. (2026, 21 Januari). *IMF Executive Board concludes 2025 Article IV consultation with Indonesia.* ([IMF](#))

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 6 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69aac286-13ac-83a1-9118-7626497f0b64>